



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis *Framing* Berita Online tentang Revisi UU TNI di *Kompas.com* dan *Tempo.com*

Ahmad Haryanto^{1*}, Canggih Aralia Aprianti Ode²

¹Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong, Indonesia, ahmadharyanto638@gmail.com

²Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Sorong, Indonesia, anggiaprilias32@gmail.com

*Corresponding Author: ahmadharyanto638@gmail.com

Abstract: *Starting from the controversial issue of the revision of the TNI Law, due to changes and additions to Article 7 paragraph 2, Article 47 and Article 53. Of the two major media outlets in Indonesia that we have known for decades, Kompas.com has proven itself in its reporting, as has Tempo.com, which is very critical in its reporting. From this point, we want to analyze how these two major media outlets frame the controversial issue of the revision of the TNI Law. In analyzing these two media outlets, the researcher uses the model developed by Zongdang Pan and Gerald M. Kosicki, examining the syntactic, script, thematic, and rhetorical structures in the news articles published by Kompas.com and Tempo.com reporting on the revision of the TNI Law. In this framing analysis, the researcher used the period from March 20 to April 17, because during that period, the news related to the revision of the TNI Law published by the two media outlets amounted to four articles from each media outlet that were most relevant to the research topic. The research method used was qualitative, and the researcher felt that four news articles were sufficient to be the object of research.*

Keywords: *Framing Analysis, Policy Controversy, Reality Construction, Online Media, Revision of the TNI Law*

Abstrak: Berangkat dari masalah terkait revisi UU TNI, yang menjadi kontroversi, dikarenakan adanya perubahan dan penambahan pasal 7 ayat 2, pasal 47 dan pasal 53. Dari dua media yang sangat besar di Indonesia yang kita kenal selama ini *Kompas.com* dalam pemerintah diberapadeka kebelakang terbukti dari pemberita-pemberitanya, begitu pun *Tempo.com* yang sangat kritis dalam pemberitaan yang dilakukan. Dari sini ingin menganalisis kedua media besar ini mem*framing* isu yang kontroversi yaitu revisi UU TNI. Dalam menganalisis kedua media tersebut peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penulis mengkaji struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam artikel berita *Kompas.com* dan *Tempo.com* yang memberitakan mengenai Revisi Undang-Undang TNI. Dalam analisis *framing* ini peneliti menggunakan periode waktu dari tanggal 20 Maret sampai 17 April, dikarenakan pada periode waktu tersebut berita-berita terkait revisi UU TNI, yang diterbitkan oleh kedua media tersebut berjumlah empat artikel dari masing-masing media yang paling sesuai dengan topik penelitian. Metode penelitian yang digunakan

adalah metode kualitatif, peneliti merasa cukup dengan empat artikel berita untuk menjadi objek penelitian.

Kata Kunci: Analisis *Framing*, Kontroversi Kebijakan, Konstruksi Realitas, Media Online, Revisi UU TNI

PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2025 memicu perhatian publik karena memuat perubahan signifikan, seperti kenaikan batas usia pensiun, perluasan peran TNI dalam menghadapi ancaman siber, dan pelanggaran penugasan prajurit aktif pada jabatan sipil. Substansi revisi tersebut menimbulkan perdebatan tajam mengingat implikasinya terhadap struktur dan fungsi TNI serta prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Di tengah kontroversi menyangkut prosedur legislasi dan potensi penyimpangan kewenangan, media massa menjadi aktor penting yang membentuk persepsi publik melalui konstruksi dan pembingkaihan pemberitaan.

Tempo.com dan *Kompas.com*, sebagai dua media arus utama, aktif menyajikan perkembangan isu ini dengan pendekatan *framing* yang berbeda. Melalui pendekatan analisis *framing*, penelitian ini menelusuri bagaimana *Tempo.com* dan *Kompas.com* menyusun, menekankan, serta mengarahkan makna dalam pemberitaan mengenai revisi UU TNI. *Tempo* dan *Kompas* dikenal sebagai dua media besar yang ada di Indonesia. *Tempo* sangat terkenal sebagai media yang sangat kritis dalam meberitakan informasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, sebaliknya *Kompas* dikenal sebagai media yang sangat pro kepada pemerintah.

Variasi dalam pembingkaihan tersebut berpotensi memengaruhi opini masyarakat, apakah melihat revisi UU TNI sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan, atau sebagai kebijakan problematis yang mengancam prinsip demokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian sistematis mengenai bagaimana kedua media tersebut merepresentasikan isu revisi UU TNI. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menganalisis *framing* *Tempo.com* dan *Kompas.com* untuk memahami konstruksi narasi yang dibangun serta implikasinya terhadap pembentukan opini publik. Dengan demikian, studi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai kontribusi media dalam proses komunikasi politik serta pengaruhnya terhadap dinamika opini publik terkait kebijakan pertahanan nasional. Analisis *framing* sendiri merupakan proses penyajian fakta oleh media yang menekankan isu-isu tertentu untuk membentuk pemahaman tertentu atas suatu peristiwa. Proses ini erat kaitannya dengan konstruksi realitas, di mana jurnalis dan media secara sadar memilih sudut pandang yang mencerminkan kebijakan editorial atau perspektif institusional. Model *framing* yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisis media. (Pan & Kosicki, 1993) menjelaskan bahwa *framing* merupakan ciri wacana berita sekaligus metode dalam mengolah dan menciptakan realitas media.

Menurut Eriyanto (Eriyanto, 2012), perangkat framing dalam model Pan dan Kosicki terdiri atas empat struktur utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *Tempo.com* dan *Kompas.com* menggunakan model *framing* Pan dan Kosicki dalam menyajikan pemberitaan mengenai revisi UU TNI, serta bagaimana konstruksi narasi media tersebut berkontribusi pada pembentukan opini publik. Perbedaan realitas media dapat muncul akibat pembingkaihan berita. Melalui pemilihan sudut pandang, identifikasi sumber informasi, serta definisi aktor dan peristiwa, media secara aktif membentuk realitas yang dikonstruksikan dalam berita.

Dengan demikian, penelitian tentang *framing* dalam pemberitaan *Kompas.com* mengenai amandemen UU TNI penting dilakukan untuk memahami dinamika komunikasi

politik dan peran media dalam memengaruhi opini publik di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi massa, khususnya dalam pemberitaan terkait kebijakan pertahanan nasional, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai konstruksi realitas media melalui analisis *framing* yang mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis *framing* dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut (Sugiyono, 2021) perubahan paradigma dalam cara memandang realitas, fenomena, dan gejala mendorong munculnya metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. (Pan & Kosicki, 1993) dalam buku mereka yang berjudul “*Framing Analysis an Approach to News Discourse*” membagi menjadi empat bagian struktur berita sebagai perangkat *framing* yaitu, struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berumber dari dokumen berupa 4 berita yang masing-masing terbit di media *tempo.com* dan *Kompas.com* dalam periode waktu atau edisi 20 Maret sampai 17 April 2025 yang dipilih peneliti dengan mempertimbangkan isu terkait revisi undang-undang tersebut yang menguak ke *public* dan menjadi perhatian *public* maupun media dalam pemberitaanya serta setiap media memiliki karakteristik yang berbeda, bagaimana ia mengemas sedemikian rupa sebuah pesan atau peristiwa sebelum di terbitkan untuk menyita perhatian atau menggiring opini masyarakat ketika melihat berita utama yang dibuat oleh media *Kompas.com* dan *Tempo.com*.

Tabel 1. *Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki*

| STRUKTUR | PERANGKAT FRAMNG | UNIT YANG DIAMATI |
|---|--|---|
| SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta | Skema Berita | Headline, Lead, Informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup |
| SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta | Kelengkapan Berita | 5W+1H |
| TEMATIK Cara wartawan menulis fakta | Detail, kohersi, bentuk kalimat, kata ganti | Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antara kalimat |
| RESTORIS Cara wartawan menekankan fakta | Leksikon, grafis, metafora | Kata, idiom, atau foto, grafik |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 2. Berita 1“Apa Itu Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal Yang Berubah”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|--|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | Apa Itu Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal Yang Berubah |
| | <i>Lead</i> | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Latar informasi dalam teks berita yaitu mengenai isi dan pasal-pasal yang berubah dalam undang- undang TNI. |

| | | |
|---|---|--|
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber yang digunakan dalam artikel hanya berasal dari satu rujukan yaitu pernyataan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. |
| | Pernyataan | Pernyataan yang dikutip dari Ketua DPR RI, Puan Maharani berupa kutipan langsung yaitu "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, dikutip dari <i>Kompas.com</i> , Kamis. |
| | Penutup | Penutup dalam teks berita yakni berupa pasal 53 mengenai batas usia pensiun anggota TNI. |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. |
| | <i>Who</i> | Ketua DPR RI Puan Maharani dan Para anggota DPR. |
| | <i>Where</i> | Gedung Senayan Jakarta |
| | <i>When</i> | Kamis (20/3/2025) |
| | <i>Why</i> | - |
| | <i>How</i> | - |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Teks berita terdiri dari 14 paragraf singkat yang secara garis besar berisi pasal-pasal perubahan dalam revisi UU TNI. Dalam berita juga terdapat hubungan antar kalimat yaitu ada kata namun dan sebelumnya |
| RETORIS Leksikon Metafora Grafis | Kata Idiom Gambar/Foto/Grafik | |



Sumber: Kompas.com/(Thinkstock)

Gambar 1. Isi RUU TNI yang disahkan DPR RI apa saja?

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah>

Tabel 3. Berita 2 Revisi “UU TNI Disahkan DPR Pengamat: Padahal Ada 3 Regulasi Yang Lebih Mendesak”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|--|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | Revisi UU TNI Disahkan DPR Pengamat: Padahal Ada 3 Regulasi Yang Lebih Mendesak |
| | <i>Lead</i> | Meski mendapat kritikan dari sejumlah kalangan, DPR tetap saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025) pagi (Paragraf 1) |

| | | |
|---|---|--|
| SKRIP Kelengkapan Berita | Latar Informasi | Latar informasi dalam teks berita ini mengenai pandangan pengamat terkait 3 regulasi yang lebih mendesak daripada RUU TNI, yaitu RUU Perampasan Aset, UU TNI Peradilan Militer dan RUU Masyarakat Adat. |
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber yaitu pernyataan dari Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan. |
| | Pernyataan | <p>Dalam artikel ini hanya mengambil pernyataan dari dikutipan langsung dari satu rujukan yaitu pernyataan dari Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Kita semakin jauh dari mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," (Paragraf 8) • "Kesenjangan antara kelompok elit dengan akar rumput, kelas menengah, dan kelas bawah itu kentara sekali," (Paragraf 10) • "Itu sebenarnya mendesak dan merupakan juga perintah undang-undang, artinya mandatnya adalah melakukan revisi atas UU Nomor 31 tahun 1997 yang belum pernah diperbarui sampai saat ini," paparnya. (Paragraf 14) • "Ditambah lagi dengan DPR yang tidak punya keseriusan untuk melakukan revisi UU Peradilan Militer yang jelas lebih mendesak daripada revisi UU TNI," (Paragraf 17) <p>"Sudah sekitar lima kali bolak balik di Prolegnas. Sekarang kan kita harus memastikan bahwa masyarakat adat itu mendapatkan perlindungan hak konvensional mereka," tutur Halili. (Paragraf 20)</p> |
| | Penutup | Penutup: Artikel berita ditutup dengan kutipan langsung dari Halili Hasan pada. (Paragraf 23) |
| | <i>What</i> | Pengesahan RUU TNI menjadi UU dinilai tidak terlalu urgen oleh sebagian kalangan. |
| | <i>Who</i> | Halili Hasan |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | <i>Where</i> | Jakarta |
| | <i>When</i> | Kamis (20/3/2025) pagi. |
| | <i>Why</i> | - |
| | <i>How</i> | - |
| | Paragraf | Artikel ini terdiri dari 23 paragraf. |
| | Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Dalam artikel berita ini juga terdapat hubungan antar kalimat yaitu kata : meski dan namun |

RETORIS Leksikon
Metafora
Grafis

Kata Idiom
Gambar/Foto/Grafik



Sumber: (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Gambar 2. Rapat paripurna DPR pengesahan RUU TNI

Sumber: <https://www.tempo.co/politik/respons-ahy-bahlil-hingga-puan-atas-pengesahan-revisi-uu-tni-1223376>

Tabel 4. Berita 3 “RUU TNI Sudah Sah Jadi UU, Berikut Poin Poin Perubahannya”

| Struktur | Unit yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|---|---|--|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | RUU TNI Sah Jadi Undang Undang, Ini Poin Poin Perubahannya |
| | <i>Lead</i> | DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Latar informasi dalam berita ini adalah perubahan poin-poin atau pasal krusial dalam Undang-Undang TNI yaitu jabatan sipil dan tugas pokok TNI. |
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber yang digunakan dalam artikel berasal dari pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan kutipan yang berasal dari pasal-pasal. |
| | Pernyataan | Pernyataan yang dikutip dari Ketua DPR RI, Puan Maharani berupa kutipan langsung yaitu "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani, dikutip dari <i>Kompas.com</i> , Kamis. |
| | Penutup | Kalimat penutup dalam berita ini adalah ayat yang terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Poin-poin krusial paling krusial perubahan Undang-Undang TNI. |
| | <i>Who</i> | Ketua DPR RI Puan Maharani |
| | <i>Where</i> | Jakarta |
| | <i>When</i> | Kamis (20/3/2025) |
| | <i>Why</i> | - |
| | <i>How</i> | - |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar | Penjelasan paragraf fokus pada tema utama pengesahan revisi Undang-Undang Tentara |

| | | |
|------------|---------|---|
| Kata Ganti | Kalimat | Nasional Indonesia (TNI) yang membahas perubahan penting dalam regulasi TNI. Dalam berita juga terdapat hubungan antar kalimat yaitu ada kata namun, selanjutnya, kemudian dan sementara itu. |
|------------|---------|---|

RETORIS Leksikon
Metafora Grafis

Kata, Idiom
Gambar/Foto/Grafik



Sumber: (WIKIMEDIA COMMONS/F.SALMAN)


Gambar 3. Ilustrasi prajurit TNI. Panglima TNI mutasi perwira tinggi AD.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya>

Tabel 5. Berita 4 “Prabowo Sudah Teken UU TNI sejak Sebelum Lebaran”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|---|
| SINTAKSIS | Head Line | Prabowo Sudah Teken UU TNI sejak Sebelum Lebaran |
| | Lead | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H. (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Latar informasi dalam teks berita yaitu mengenai Presiden Prabowo Subianto sudah meneken UU TNI, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H. |
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber: Artikel ini mengutip pernyataan dari 2 narasumber yakni dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. |
| | Pernyataan | Dalam artikel ini hanya mengambil 2 ditambah dari antara news berupa pernyataan dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, yang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yakni. <ul style="list-style-type: none"> • "Sudah, sudah, sebelum Lebaran," (Paragraf 3) • "Tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya," (Paragraf 6) • “Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo, juga Jaksa Agung Pidana Militer kan |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” (Paragraf 11)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,” (Paragraf 13)• Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H. (Paragraf 1)• Ia menyampaikan bahwa UU itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. (Paragraf 4)• Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa dwifungsi TNI tidak akan terjadi. (Paragraf 9) |
| | Penutup | Artikel berita ditutup dengan kutipan langsung dari Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas pada Paragraf 13). |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi UU TNI |
| | <i>Who</i> | Presiden Prabowo Subianto |
| | <i>Where</i> | - |
| | <i>When</i> | 27-28 Maret 2025 |
| | <i>Why</i> | - |
| | <i>How</i> | - |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Teks berita terdiri dari 13 paragraf singkat yang secara garis besar berisi mengenai Presiden Prabowo Subianto sudah meneken UU TNI, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Dalam berita terdapat kata hubungan antar kalimat yaitu ada kata namun dan sebelumnya. |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| RETORIS Leksikon Metafora Grafis | Kata, Idiom Gambar/Foto/Grafik |  |
|---|-----------------------------------|--|

Sumber: (ANTARA/Tim Media Presiden Prabowo Subianto)

Gambar 4. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dalam Forum Diplomasi Antalya

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/17/13082821/prabowo-sudah-teken-uu-tni-sejak-sebelum-lebaran>

Tabel 6. Berita 1 “DPR Sahkan Revisi UU TNI, Bagaimana Tahapan Penyusunan RUU Menjadi UU?”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|--|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | DPR Sahkan Revisi UU TNI, Bagaimana Tahapan Penyusunan RUU Menjadi UU? |

| | | |
|--|---|---|
| | <i>Lead</i> | Ketua DPR Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan Revisi UU TNI. Bagaimana tahapan RUU menjadi UU? (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Pengesahan Revisi UU TNI dan tahapan penyusunan RUU menjadi UU. |
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber berasal dari Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. |
| | Pernyataan | <p>Kutipan langsung berasal dari Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025. • "Apabila tim perumus, tim sinkronisasinya belum selesai (membahas), ya, mungkin belum bisa dibawa (di rapat paripurna)," katanya • "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Puan Maharani dalam sidang paripurna. Anggota dewan yang hadir pun berteriak, • "Setuju," diiringi ketuk palu Puan. • Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah "persetujuan dengan perubahan" yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang; |
| | Penutup | Kalimat ditutup dengan tahapan pengundangan dalam penyusunan RUU menjadi UU. |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Tahapan-tahapan penyusunan RUU menjadi UU. |
| | <i>Who</i> | Sufmi Dasco Ahmad |
| | <i>Where</i> | - |
| | <i>When</i> | Kamis 20 Maret 2025 |
| | <i>Why</i> | - |
| | <i>How</i> | Proses pengesahan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, pengesahan sampai pada tahap perundangan. |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Artikel berita terdiri dari 18 paragraf. Terdapat pula hubungan antar kalimat yaitu kata namun dan sebelumnya. |

RETORIS Leksikon
Metafora Grafis

Kata, Idiom
Gambar/Foto/Grafik



Sumber: Tempo.com/Martin Yogi Pardamean

Gambar 5. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani

Sumber: <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-tni-bagaimana-tahapan-penyusunan-ruu-menjadi-uu--1222202>

Tabel 7. Berita 2 “Top Nasional: Pengesahan Revisi UU TNI hingga Tempo Dikirim Kepala Babi.”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|--|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | Top Nasional: Pengesahan Revisi UU TNI hingga Tempo Dikirim Kepala Babi |
| | <i>Lead</i> | Revisi UU TNI hingga Tempo Dikirim Kepala Babi terjadi kemarin. Berikut ringkasannya. (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Latar informasi dalam teks berita yaitu mengenai kantor Tempo yang dikirim kepala babi oleh orang tak dikenal. |
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber: Artikel ini mengutip pernyataan dari 2 narasumber yakni dari Ketua DPR Puan Maharnai dan Pimpinan Redaksi Tempo Setri Yasra. |
| | Pernyataan | Dalam artikel ini hanya mengambil 2 sumber pernyataan berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dari Ketua DPR Puan Maharani dan Pimpinan Redaksi Tempo Setri Yasra, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • “Nanti kami siap memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai. (Paragraf 4) • "Kami mencurigai ini sebagai upaya teror dan melakukan langkah-langkah yang menghambat kerja jurnalistik," (Paragraf 9) • Puan mengklaim Revisi UU TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP ini juga menyatakan bahwa penyusunan undang-undangan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. (Paragraf 4) • Pimpinan Redaksi Tempo Setri Yasra menduga upaya ini sebagai teror terhadap karya jurnalistik Tempo. (Paragraf 9) |

| | | |
|--|---|--|
| | Penutup | Penutup dalam teks berita yaitu berupa dukungan dari 43 tokoh dari berbagai kalangan, seperti pengacara, akademisi, pegiat HAM, dan wartawan, dalam menghadapi aksi teror dan intimidasi. (Paragraf 10) |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Pengesahan revisi UU TNI dan insiden pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo |
| | <i>Who</i> | Francisca Christy Rosana |
| | <i>Where</i> | Kantor tempo |
| | <i>When</i> | Rabu, 19 Maret 2025. |
| | <i>Why</i> | Pimpinan redaksi tempo setri yasra menduga upaya ini sebagai teror terhadap karya jurnalistik tempo. |
| | <i>How</i> | Tanggapan pihak terkait dan masyarakat sipil terhadap kejadian tersebut |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Artikel ini terdiri dari 10 paragraf singkat, dimana membahas mengenai kantor Tempo yang dikirim kepala babi oleh orang tak dikenal. |
| RETORIS Leksikon Metafora Grafis | Kata, Idiom Gambar/Foto/Grafik | Pada teks artikel 2 ini, ditemukan penggunaan kata "dikirim kepala babi" mengacu pada ancaman dan ketakutan serius yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau membungkam kerja jurnalistik. |



Sumber: Tempo.com/Gunawan Wicaksono


Gambar 6. Paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana di kantor Tempo.

Sumber: <https://www.tempo.co/politik/top-nasional-pengesahan-revisi-uu-tni-hingga-tempo-dikirim-kepala-babi-1222348>

Tabel 8. Berita 3 “Respons AHY, Bahlil, hingga Puan atas Pengesahan Revisi UU TNI”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|---|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | Respons AHY, Bahlil, hingga Puan atas Pengesahan Revisi UU TNI |
| | <i>Lead</i> | Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan revisi UU TNI yang baru disahkan menjadi undang-undang membatasi perwira TNI dalam memasuki instansi sipil. (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Latar informasi dalam teks berita yaitu respon para tokoh politik atas pengesahan revisi UU TNI. |

| | |
|----------------|---|
| Kutipan Sumber | Kutipan sumber: Artikel ini mengutip pernyataan dari 5 narasumber yakni dari Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadalia, Puan Maharani, Budisatrio Djiwandono, Kuasa hukum pemohon, Abu Rizal Biladina. |
| Pernyataan | <p>Dalam artikel ini hanya mengambil 5 sumber pernyataan berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dari, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono, Kuasa hukum pemohon, Abu Rizal Biladina, Wakil Ketua Komisi I DPR dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• “Tidak benar kalau kemudian ini akan mengembalikan ke masa orde baru dwifungsi ABRI. Memang simpang siur narasi yang beredar di masyarakat luas dan sebetulnya kita harus bisa melihat dengan sabar dan detail apa saja yang menjadi perbedaan dari UU sebelumnya,” (Paragraf 7)• “Lembaga-lembaga tersebut juga masih banyak peran yang bisa dijalankan dan memang ada relevansinya dengan tugas-tugas TNI, khususnya dalam operasi militer selain perang (OMSP),” (Paragraf 9)• “Saya pikir semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal kita sosialisasikan ya,” (Paragraf 13)• “Semuanya punya niat yang baik ya,” (Paragraf 14)• “Alhamdulillah baru saja Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-Undang TNI, yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua asas legalitas yang memang harus dilaksanakan,” (Paragraf 19)• “Dari penerimaan surat, sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar, dan lain-lain sebagainya, bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka,” (Paragraf 20)• “Proses pembentukannya sangat janggal dan tergesa-gesa,” (Paragraf 4)• “Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi,” (Paragraf 16)• “Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan supremasi sipil tetap terjaga dan tidak ada upaya untuk |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer,” (Paragraf 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu, tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa, juga sudah kami dengarkan,” (Paragraf 19) • “Nanti kami siap memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan insyaallah tidak,” (Paragraf 20) • “Kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,” (Paragraf 21) |
| | Penutup | Artikel berita ditutup dengan kutipan langsung dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yakni berupa harapan dari RUU TNI yang baru disahkan kedepannya bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. (Paragraf 21) |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Respon pengesahan revisi UU TNI |
| | <i>Who</i> | AHY, Bahlil, dan Puan Maharani |
| | <i>Where</i> | Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kompleks Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat |
| | <i>When</i> | Kamis 20 Maret 2025. |
| | <i>Why</i> | Penjelasan dan kritik terkait revisi UU ini, termasuk kekhawatiran supremasi sipil dan potensi era dwifungsi TNI. |
| | <i>How</i> | Melalui sidang DPR dan reaksi masyarakat serta tokoh politik melalui pernyataan resmi dan demonstrasi. |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Teks berita terdiri dari 21 paragraf singkat dimana membahas mengenai respon AHY, Bahlil, Puan Maharani, Budisatrio Djiwandono dan Abu Rizal Biladina, terkait pengesahan RUU TNI. |
| RETORIS Leksikon Metafora Grafis | Kata, Idiom Gambar/Foto/Grafik |  <p>Sumber:Tempo.com/Martin Yogi Pardamean</p> |

**Gambar 7. Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin menyerahkan laporan
pandangan pemerintah kepada Ketua DPR
Puan Maharani**

Sumber: <https://www.tempo.co/politik/respons-ahy-bahlil-hingga-puan-atas-pengesahan-revisi-uu-tni-1223376>

Tabel 9. Berita 4 “Prabowo Telah Teken Meneken UU TNI”

| Struktur | Unit Yang Diamati | Hasil Pengamatan Dari Sumber |
|-----------|-------------------|---|
| SINTAKSIS | <i>Head Line</i> | Prabowo Telah Teken Meneken UU TNI |
| | <i>Lead</i> | Presiden Prabowo telah menandatangani revisi UU TNI yang sebelumnya telah disahkan DPR. Menurut Mensesneg, Presiden sudah menekan pada akhir Maret. (Paragraf 1) |
| | Latar Informasi | Latar informasi dalam teks berita yaitu Presiden Prabowo Subianto telah menekan Revisi UU TNI sebelum lebaran pada 27 atau 28 maret 2025. |
| | Kutipan Sumber | Kutipan sumber: Artikel ini mengutip pernyataan dari 2 narasumber yakni: dari Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Supratman. |
| | Pernyataan | Dalam artikel ini hanya mengambil 3 sumber pernyataan berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Komnas Ham, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • "Sudah sudah, sebelum lebaran, tanggal 27 atau 28 Maret," (Paragraf 1) • “Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,”. (Paragraf 3) • “Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi,” (Paragraf 4) • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan UU TNI yang telah disahkan DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 telah diteken Prabowo pada 27 atau 28 Maret 2025. (Paragraf 1) • Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. (Paragraf 2) • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan revisi UU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer dan stagnansi regenerasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia. (Paragraf 10) • Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM pada Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan perluasan prajurit aktif di lembaga sipil pada Pasal 47 ayat (2) revisi UU TNI berisiko |

| | | |
|--|---|--|
| | | menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI. (Paragraf 11) |
| Penutup | | Penutup: Artikel berita ditutup dengan kutipan berupa pernyataan dari Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah yakni berupa perluasan prajurit aktif di lembaga sipil pada Pasal 47 ayat (2) revisi UU TNI berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI . (Paragraf 11) |
| SKRIP Kelengkapan Berita | <i>What</i> | Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi UU TNI |
| | <i>Who</i> | Presiden Prabowo Subianto |
| | <i>Where</i> | - |
| | <i>When</i> | Pada tanggal 27 atau 28 Maret 2025 |
| | <i>Why</i> | - |
| | <i>How</i> | - |
| TEMATIK Detail Koherensi Bentuk Kalimat Kata Ganti | Paragraf Proposisi Kalimat Hubungan Antar Kalimat | Teks berita terdiri dari 11 paragraf singkat yang secara garis besar berisi tentang Presiden Prabowo Subianto telah meneken Revisi UU TNI sebelum lebaran pada 27 atau 28 maret 2025. Dalam berita terdapat hubungan antar kalimat yaitu ada kata sebelumnya dan selanjutnya. |
| RETORIS Leksikon Metafora Grafis | Kata, Idiom Gambar/Foto/Grafik | |



Sumber: Tempo.com/Imam Sukamto

Gambar 8. Presiden Prabowo Subianto se usai menerima secara resmi kunjungan kenegaraan Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia

Sumber: <https://www.tempo.co/politik/prabowo-telah-meneken-uu-tni-1232375>

PEMBAHASAN

Struktur Sintaksis

Pada 4 artikel berita yang diterbitkan *Kompas.com*, ditemukan dari analisis lead dan headline bahwasanya lead dari 4 artikel berita yakni berita 1 dan 3 belum dapat menggambarkan keseluruhan isi berita. Sementara *Tempo.com*, lead dan headline dari 4 artikel berita yang diterbitkannya sudah dapat menggambarkan keseluruhan isi berita. Dapat dikatakan bahwasanya jurnalis dari kedua media tersebut sudah membuat *headline* dan *lead* yang menarik dan mudah dipahami. Sehingga ketika pembaca membaca *headline* dan *lead*-nya, mereka sudah dapat mengetahui isi dari suatu berita.

Dalam memberitakan topik mengenai isu pengesahan Revisi UU TNI, yang menuai banyak kontroversi di berbagai kalangan, *Kompas.com* mengambil 3 sudut pandang pernyataan dari 3 sisi yakni dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) organisasi non pemerintah yaitu

Halili Hasan Direktur Eksekutif SETARA Institute, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas pada berita 2 dan 4. Dikarenakan informasi yang didapat berasal dari pernyataan 3 sisi saja, isi pemberitaannya lebih cenderung netral, dikarenakan tidak semua mengambil dari pernyataan dari tokoh pemerintah, tetapi juga non pemerintah. Adapun kritikan dalam pemberitaannya tetapi tidak secara eksplisit.

Sebaliknya *Tempo.com* walaupun informasi yang didapatkan *Tempo.com* dalam beritanya berasal dari, berbagai golongan seperti: 1) dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat; 2) dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia; 3) dari ketua DPR Puan Maharani; 4) dapat dipresepsikan sejalan dengan kebijakan pemerintah, bisa dilihat dari salah satu pernyataan-pernyataan yang diambil dari berbagai fraksi partai politik yang membenarkan proses Rancangan Undang-Undang (RUU), Tentara Nasional Indonesia (TNI), RUU TNI menjadi undang-undang yang telah memenuhi semua asas legalitas. "Alhamdulillah baru saja Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-Undang TNI, yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua asas legalitas yang memang harus dilaksanakan Pernyataan yang dikutip dari salah tokoh partai politik yang dipilih sesuai dengan topik berita yang ingin diangkat *Tempo.com*.

Struktur Skrip

Untuk unsur kelengkapan berita yakni 5W+1H pada struktur skrip, kedua media *online* baik *Kompas.com* maupun *Tempo.com* sama-sama tidak memenuhi unsur kelengkapan berita. Karena beberapa berita di media *online Kompas.com* dan *Tempo.com* ditemukan menghilangkan beberapa unsur. Seperti di *Kompas.com*, pada berita 1, 2, 3 dan 4 tidak ada unsur *why* dan unsur *how*, kemudian pada berita 4, *Kompas.com* juga tidak ada unsur *where* dalam beritanya. Sementara itu untuk *Tempo.com* sendiri, pada berita 1, tidak ada unsur *where* dan *why*. Untuk berita 4, tidak ada unsur *where*, *why* dan *how*. Penghilangan beberapa unsur tersebut kemungkinan karena media tidak mendapatkan informasi terkait unsur unsur tersebut atau ingin lebih memfokuskan suatu unsur dengan menghilangkan unsur lainnya.

Struktur Tematik

Dalam penggunaan konjungsi antar kalimat, media *Kompas.com* dan *Tempo.com* sama-sama menggunakan kata penghubung dalam unsur beritanya. Pertama, kata namun digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan atau penolakan terhadap informasi sebelumnya, kedua kata sebelumnya berfungsi menunjukan kejadian berikutnya adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Ketiga, kata meski berfungsi menyatakan bahwa suatu hal tetap terjadi atau dianggap benar. Keempat, kata selanjutnya digunakan untuk menunjukkan akibat, kontras, atau kelanjutan suatu peristiwa. Kelima, kata sementara itu berperan menghubungkan dua aksi yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan dan saling berkaitan.

Struktur Restoris

Ditemukan bahwasanya *Kompas.com* menggunakan foto dalam menceritakan realitas sebuah peristiwa dari beritanya, dimana penggunaan foto ini diletakkan setelah *headline* dan kebanyakan menggunakan foto yang menggambarkan prajurit TNI, seperti contoh pada berita 1 dan 3 dimana foto yang dilampirkan merupakan gambar pasukan prajurit TNI. Sementara itu, Terkadang juga *Tempo.com* menggunakan foto lama yang sudah diterbitkan terlebih dahulu untuk dipakai beritanya yang lain seperti pada berita 3 yang menggunakan foto dari berita 1. *Tempo.com* juga menonjolkan dalam idiom, terlihat pada frasa berita 2 "dikirim kepala babi" untuk menceritakan realitas dari sebuah peristiwa dari beritanya.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan *framing* antara *Kompas.com* dan *Tempo.com* tidak sekadar mencerminkan variasi teknis jurnalistik, tetapi juga merepresentasikan orientasi editorial dan posisi ideologis masing-masing media dalam memaknai isu revisi UU TNI. *Kompas.com* cenderung mengedepankan pola *hard news* yang ringkas, faktual, dan berorientasi pada peristiwa, sehingga *framing* yang dibangun lebih menekankan “apa yang terjadi” dibandingkan “mengapa” dan “bagaimana” implikasi sosial-politiknya. Pendekatan ini berpotensi menghasilkan pemberitaan yang informatif, namun relatif minim dalam menggali konteks struktural dan dinamika kekuasaan di balik isu.

Sebaliknya, *Tempo.com* mengonstruksi *framing* yang lebih interpretatif melalui kombinasi *hard news* dan *soft news*, dengan memperluas konteks, penggunaan *lead* yang konsisten, serta elemen retorik seperti idiom. Strategi ini memperkuat dimensi tematik dan retorik, namun berisiko mengarahkan pembaca pada sudut pandang tertentu. Kelemahan kedua media yang sama-sama belum konsisten memenuhi unsur 5W+1H menunjukkan bahwa praktik *framing* kerap mengorbankan kelengkapan informasi demi penekanan perspektif. Dengan demikian, *framing* revisi UU TNI dalam kedua media bukanlah refleksi realitas yang netral, melainkan hasil konstruksi wacana yang dipengaruhi oleh nilai, gaya, dan kepentingan redaksional masing-masing media.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran baik secara praktis maupun teoritis terkait pemberitaan Revisi UU TNI. Secara praktis, *Kompas.com* dan *Tempo.com* disarankan untuk lebih melengkapi unsur berita, khususnya pada 5W+1H, agar informasi yang disampaikan lebih utuh dan tidak menimbulkan kekurangan pemahaman, terutama pada isu-isu yang bersifat krusial dan penting. Secara teoritis, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, serta memperluas objek penelitian dengan mengkorelasikan lebih banyak media.

REFERENSI

- Al Madinah, S., & Wijayanti, Q. N. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Calon Presiden 2024 Dimasa Menuju Kampanye Dalam Pemilu 2024 Pada Media Jawapos.Com Dan Kompas.Com Periode Bulan Oktober. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 11–20.
- Alfarizi, Piriani, Mahdi, S., & Suryaningsih. (2024). Online News Media (Detak Media): Analysis of the Strategic Role in Disseminating Information to the Public in the Context of the Digital Era. *Journal of Language Development and Linguistics*, 3(1), 49–56. <https://doi.org/10.55927/jldl.v3i1.7514>.
- Bergström, A., & Jervelycke Belfrage, M. (2018). News in Social Media: Incidental consumption and the role of opinion leaders. *Digital Journalism*, 6(5), 583–598. <https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1423625>.
- Bromo, R. D. atas T. L. G. di. (2025). Respons AHY, Bahlil, hingga Puan atas Pengesahan Revisi UU TNI. *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/politik/respons-ahy-bahlil-hingga-puan-atas-pengesahan-revisi-uu-tni-1223376>.
- Chella Defa Anjelina, I. S. A. (2025). Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah>.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). The Moderating Effect of Corporate Governance in the Relationship Women Owned Enterprises: A Proposed Conceptual Framework. 11, 167–186.

- Delviana, N. (2024). Inisiasi Pembentukan Angkatan Siber dan Digital dalam Organisasi Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 392–402. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i12.1016>.
- Eriyanto. (2012). *Pdf-Eriyanto-2012-Analysis-Framing-Konstruksi-Ideologi-Dan-Politik-Media-Pdf_Compress*.
- Fika Nurul Ulya, J. C. (2025). *Prabowo Sudah Teken UU TNI sejak Sebelum Lebaran*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/17/13082821/prabowo-sudah-teken-uu-tni-sejak-sebelum-lebaran>.
- Frasticha, L. Y., & Pribadi, F. (2022). Bingkai Demokratisasi Isu Pengesahan UU Cipta Kerja (Analisis Framing Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Pada Media Dalam Jaringan Kompas.Com Dan Tribunnews.Com). *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24167/jkm.v2i1.3206>.
- Gorp, B. Van. (2015). *Strategies to take subjectivity out of framing analysis*. January 2010.
- Hammam Izzuddin, Pribadi Wicaksono, dan V. I. G. (2025). *Top Nasional: Pengesahan Revisi UU TNI hingga Tempo Dikirim Kepala Babi*. Tempo.Com. <https://www.tempo.co/politik/top-nasional-pengesahan-revisi-uu-tni-hingga-tempo-dikirim-kepala-babi-1222348>.
- Irda Sopiyan, H. S. (2023). Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki Terhadap Pemberitaan Gempa Bumi Cianjur Pada Media Online Kompas.Com dan Antarnews.Com Irda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(April), 229.
- Izzuddin, N. P. N. dan H. (2025). *DPR Sahkan Revisi UU TNI, Bagaimana Tahapan Penyusunan RUU Menjadi UU?* Tempo.Com. <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-revisi-uu-tni-bagaimana-tahapan-penyusunan-ruu-menjadi-uu--1222202>.
- Klonick, K. (2016). *Re-Shaming the Debate : Social Norms , Shame , and Regulation in an Internet Age*. 75(4).
- Kurniawan, S. F., Sujoko, A., & Wulandari, M. P. (2023). Relasi Media dan Politik (Analisis Framing pada Media yang Berafiliasi Politik Terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu 2024). *Jurnal Nawala Politika*, 1(1), 247–256.
- Kurniawati, D., & Simamora, A. J. J. (2024). Analisis Framing Media Online Dalam Pemberitaan Jokowi Mengganggu Saat Ditanya Soal Reshuffle Kabinet (Studi Pada Situs Berita Online Detik.Com Edisi 26 Desember 2022). *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 59–64. <https://doi.org/10.59966/semar.v2i1.619>.
- Lungulescu, B. A. (2024). *Article 7 TEU in the News : How the Media Framed the Discussion Around the " Nuclear Option "*. June, 1–96.
- Makbull Rizki. (2022). Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 54–62. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6351>.
- Muhammad Iqbal Amar, I. S. A. (2025). *Revisi UU TNI Disahkan DPR, Pengamat: Padahal Ada 3 Regulasi yang Lebih Mendesak*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/21/063000165/revisi-uu-tni-disahkan-dpr-pengamat--padahal-ada-3-regulasi-yang-lebih>.
- Munif, M. A. (2023). Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki dalam Kontruksi Pemberitaan Wacana Calon Presiden 2024 di Indonesia. *Selasar KPI : Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 48–61. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar>.
- Ozerturk, S. (2022). Media access, bias and public opinion. *European Economic Review*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2022.104161>.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>.
- Rahel Narda Chaterine, A. R. (2025). *RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin*

- Perubahannya*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya>.
- Saputra, H. M. dan E. Y. (2025). *Prabowo Telah Meneken UU TNI*. Tempo.Com.
<https://www.tempo.co/politik/prabowo-telah-meneken-uu-tni>.
- Sartika, C. D., Anshori, D. S., & Kusumah, E. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Kawal Putusan MK pada Kompas.com. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 206–221. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3823>.
- Shi, H. (2023). The mutual influence between politics and media. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research*, 6(1), 466. <https://doi.org/10.56028/aehtsr.6.1.466.2023>.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta Cv.
- Vincze, H. O. (2014). ‘ *The Crisis* ’ as a journalistic frame in Romanian news media. 71. <https://doi.org/10.1177/0267323114541610>.
- Widyaya, I., & Setiawan, W. (2023). Analisis Framing Model Robert N. Entman dalam Representasi Publik Figur Politik: Episode “Dosa-Dosa Anies” di Program “Kick Andy” Metro TV. *Sibatik Journal*, 3(1), 103–118. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.
- Zulkifli, A. (2021). *50 Tahun Tempo: Selalu Menjadi Media Terdepan Mengkritik Kekuasaan*. TEMPO.CO, <https://www.tempo.co/internasional/50-tahun-tempo-selalu-menjadi-media-terdepan-mengkritik-kekuasaan-533562>.